

**PERSYARATAN PERIZINAN LINGKUNGAN BAGI PELAKU USAHA SEBAGAI  
INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI INDONESIA**

**Dr. Suparto Wijoyo dan Wilda Prihatiningtyas, S.H.**

Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Email : [wilda.fhunair@gmail.com](mailto:wilda.fhunair@gmail.com)

**Abstract**

*The functional meaning of environmental license in order to manage environment can be seen on the precision or exactness of fulfillment of conditions of environmental license which administratively is relevant for environmental protection. The conditions, that must be met to hold environmental license, have important meaning to evaluate environmental management conducted by corporation. Conditions of environmental license as inserted in document of license are direction that must be followed by the holder of license. Government institutions which have competence to give license should formulate all aspects of operation of industrial activity in the form environmental license.*

Keywords : environmental licence, environmental protection, environmental management.

**1. Pengantar: Izin yang Mempertimbangkan Perlindungan Lingkungan**

Makna fungsional izin lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tercermin pada ketepatan penuangan persyaratan perizinan yang secara administratif sangat relevan bagi perlindungan lingkungan:

*There are many cases where enforcement of general environmental regulations and standards, alone, is insufficient to effectively protect the environment. In these case, it is useful for additional and site specific environmental control conditions to be applied throughout the period of continuing operations. This can be done by attaching relevant conditions specific to the particular operation to the environmental protection of pollution control licence for that operation, and the enforcement of those conditions.<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup>Warwick Forrest, *Manual for Environmental Law Enforcement and Casework*, Project Report No. 54, h. 19. (Bapedal Jawa Timur)

Melalui persyaratan perizinan itulah instrumen perizinan lingkungan memiliki arti penting dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan:

*An environmental protection licence is a tool that an environmental agency can use to impose conditions on the operations of a particular premise or site to strengthen its environmental management and performance. It is a licence to operate and to control pollution (not a "licence to pollute"), subject to a number of site specific conditions. The licence conditions control the actual or potential environmental impacts from the site.*<sup>58</sup>

Persyaratan perizinan lingkungan yang tertuang dalam dokumen izin adalah arahan yang wajib ditaati para pemegang izin. Instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan merumuskan semua aspek operasional kegiatan industri dalam format izin lingkungan.

Penuangan persyaratan perizinan lingkungan harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati. Izin lingkungan yang diterbitkan tidak mengenai sasaran untuk kepentingan perlindungan lingkungan apabila persyaratan perizinan yang diperlukan tidak dituangkan secara spesifik, tegas, tepat, terarah, terukur serta dapat diimplementasikan.<sup>59</sup>

Izin lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industri yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup. Kemampuan instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan untuk menetapkan persyaratan perizinan akan mempengaruhi dan menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi faktor penting bagi pengembangan "*legal instruments of environmental policy*".<sup>60</sup>

## 2. Pembidangan Persyaratan Perizinan Lingkungan

Terdapat pembidangan persyaratan perizinan lingkungan yang mengakomodasi segala bentuk komponen dasar perlindungan lingkungan, yaitu:

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 17 dan 20. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) and East Java Pollution Control Implementation (PCI) Project, *Manual for Environmental Law Enforcement and Casework*, Project Report No. 54, December 1998. Laporan ini merupakan hasil penelitian bersama dari "A Project Managed on Behalf of the Government of Indonesia and the Australia Agency for International Development (AusAID) by the CSS Joint Venture: CMPS&F - CINCLAIR KNIGHT MERZ - SAGRIC".

<sup>60</sup>G.H. Addink, *Penataran Environmental ... op.cit.*, h. 29-68. Th.G. Drupsteen dan L. Woltgens, *op.cit.*, h. 30.

- a. persyaratan standar ("*standard conditions*")
- b. persyaratan batas ("*limit conditions*")
- c. persyaratan operasi ("*operating conditions*")
- d. persyaratan pemantauan ("*monitoring conditions*"), dan
- e. persyaratan pelaporan ("*reporting conditions*").<sup>61</sup>

Persyaratan standar ("*standard conditions*") berisikan penegasan bahwa pemegang izin lingkungan diharuskan untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan baku mutu lingkungan yang relevan, memelihara sarana teknis pengelolaan lingkungan hidup, serta menginformasikan kepada instansi pemberi izin mengenai emisi yang melebihi baku mutu.<sup>62</sup>

Persyaratan batas ("*limit conditions*") perizinan lingkungan memuat perincian daftar bahan pencemar yang perlu mendapat perhatian dan beban masing-masing konsentrasi "*pollutants*". Penerapan pembatasan dilakukan berdasarkan tingkat buangan emisi yang berasal dari sumber pencemaran (industri).<sup>63</sup>

Persyaratan operasi ("*operating conditions*") berkaitan dengan lokasi dan kegiatan industri. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa instalasi industri yang didirikan hanya mempunyai risiko yang kecil atau tidak mencemarkan lingkungan.

Dalam persyaratan pemantauan ("*monitoring conditions*") termuat kewajiban perusahaan untuk melakukan monitoring internal terhadap semua emisi. Hasil pemantauan diinformasikan secara terbuka dan dapat menjadi indikator kehandalan kinerja industri yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan pelaporan ("*reporting conditions*") merupakan fase lanjutan dari persyaratan pemantauan yang menekankan pada kegiatan untuk melaporkan hasil pemantauan kepada badan pengelola lingkungan dan masyarakat. Dari persyaratan pelaporan dapat diketahui tingkat penataan industri terhadap keseluruhan persyaratan perizinan lingkungan.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Warwick Forrest, *loc.cit.*

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 21 The U.S. Environmental Protection Agency, *RCRA Orientation Manual*, Office of Solid Waste/Communications, Information, and Resources Management Division, Washington, D.C., 1998, h. 123-137.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 23. Sehubungan dengan pembahasan ini, sebagai bahan perbandingan dapat dibaca pula Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Laut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan Pollution Control Implementation (PCI), *Bahan Pendukung Lokakarya Perizinan Buangan Limbah Cair*, Bandung, 30-31 Maret 1999, h. 55-58.

Persyaratan perizinan lingkungan tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan secara kategoris dalam: **persyaratan prosedural** (*"procedural conditions"*), **persyaratan substansial** (*"substantial conditions"*) dan **persyaratan evaluatif** (*"evaluation conditions"*). Persyaratan prosedural menyangkut identitas perusahaan yang termanifestasi dalam *"application form"* izin lingkungan. Persyaratan substansial berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang izin dalam menjalankan instalasi sebagaimana terangkum dalam persyaratan standar dan persyaratan batas. Persyaratan evaluatif merupakan tindak lanjut yang harus dilakukan pemegang izin (pengawasan internal) maupun instansi yang berwenang (pengawasan eksternal) dalam menilai tingkat ketaatan penanggung jawab instalasi. Komponen persyaratan evaluatif direfleksikan dalam persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan.

Esensi ketiga jenis persyaratan perizinan lingkungan termaksud (persyaratan prosedural, persyaratan substansial dan persyaratan evaluatif) dapat digambarkan dalam tabel berikut:

#### Esensi Persyaratan Perizinan Lingkungan

| PERSYARATAN PROSEDURAL   | PERSYARATAN SUBSTANSIAL  | PERSYARATAN EVALUATIF  |
|--|--|--|
| <p><b>* Identitas Pemohon:</b><br/>Nama<br/>Alamat<br/>Jabatan<br/>dan seterusnya.</p> <p><b>* Data Perusahaan:</b><br/>Nama<br/>Kategori Industri<br/>Peta Lokasi<br/>dan seterusnya</p> <p><b>* Informasi Produksi:</b><br/>Bahan Produksi<br/>Proses Produksi</p> | <p><b>* Persyaratan Standar:</b><br/>Mentaati peraturan per-undang-undangan lingkungan (terkait);<br/>Mentaati baku mutu lingkungan (terkait);<br/>Pengoperasian instalasi dengan baik (sesuai dengan standar teknis)</p> <p><b>* Persyaratan Batas:</b><br/>Konsentrasi dan beban pencemaran (emisi) sesuai dengan syarat yang ditetapkan</p> | <p><b>* Persyaratan Pemantauan:</b><br/>Mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan lingkungan yang dilakukan dalam kegiatan industrinya;<br/>Melakukan pemantauan semua limbah buangan industri (emisi);<br/>Menginformasikan kinerja pengelolaan lingkungan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat;<br/>Memberitahukan tingkat penataan lingkungan kepada publik;<br/>Mempublikasikan tentang sifat dan frekuensi pemantauan</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Kapasitas Produksi dan seterusnya</p> <p><b>* Deskripsi Instalasi</b></p> <p><b>Pengolahan Limbah:</b></p> <p>Jumlah emisi Teknologi yang digunakan</p> <p>Teknik pengolahan Bahan pencemar yang dihasilkan</p> <p>* Dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan</p> | <p><b>* Persyaratan Operasi:</b></p> <p>Mencegah terjadinya Pencemaran lingkungan; Pengoperasian instalasi yang tidak mencemarkan lingkungan</p> | <p><b>* Persyaratan Pelaporan:</b></p> <p>Memberitahukan kepada publik saat terjadi keadaan darurat atau bahaya (emisi yang dibuang tidak mentaati baku mutu emisi karena gangguan teknis instalasi); Melaporkan secara periodik atau berkala semua hasil pemantauan yang dilakukan secara internal (oleh penanggung jawab perusahaan)</p> |
|--|--|--|

Persyaratan prosedural, substansial dan evaluatif merupakan kesatuan yuridis administratif dalam tatanan perizinan lingkungan. Elemen persyaratan prosedural menginformasikan tentang identitas pemohon izin secara individual maupun institusional kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan. Lingkup persyaratan substansial menunjukkan beragam kewajiban yang harus dilakukan pemegang izin lingkungan. Komponen persyaratan evaluatif digunakan untuk menilai tingkat penataan internal dan eksternal pemegang izin lingkungan terhadap persyaratan substansial yang ditetapkan instansi yang berwenang di bidang perizinan lingkungan. Dari persyaratan evaluatif dapat diketahui kinerja pengelolaan lingkungan pemegang izin dalam mengimplementasikan izin lingkungan.

### 3. Persyaratan Prosedural Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan

Materi persyaratan prosedural Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan ternyata tidak sama. Persyaratan prosedural Izin HO dapat ditelusuri pada Pasal 4 HO:

*Bij het verzoek van vergunning wordt een nauwkeurige omschrijving, zoo noodig toegelicht door nauwkeurige teekeningen, overgelegd van de plaats, waar de*

*inrichting zal worden opgericht, zoomede van de daarbij te bezigen machinerijen, werktuigen en hulpmiddelen en van hun plaatsing in de inrichting, benevens een opgave van het geen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd, verzameld of bewaard.*<sup>65</sup>

Ketentuan Pasal 4 HO telah dijabarkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri (Permendagri No. 7/1993), yang mana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Permendagri No. 27/2009)

Persyaratan prosedural Izin Usaha Industri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU No. 3/2014), namun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (PP No. 107/2015). Izin Usaha Industri dibedakan menjadi Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Industri Besar.

Persyaratan prosedural Izin Lokasi terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dan *Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal* (Permeneg Agraria/ Kepala BPN No. 2/1993). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sedangkan untuk Izin Lingkungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada dasarnya adalah prasyarat mutlak sebelum diterbitkannya Izin Usaha. Izin lingkungan diterbitkan pada saat tahap perencanaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai Izin Lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No. 27/2012).

Bertumpu pada berbagai peraturan perundang-undangan bidang perizinan dapat disarikan persyaratan prosedural Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>65</sup>Terjemahan bebas Pasal 4 HO: Permohonan untuk mendapatkan izin harus dilampiri dengan keterangan yang seksama, jika perlu dijelaskan pula dengan gambar yang rinci tentang lokasi di mana instalasi itu akan didirikan, begitu juga tentang mesin-mesin yang digunakan dan alat-alat bantu (perkakas-perkakas) yang diperlukan dan tentang tempatnya di dalam instalasi, demikian pula suatu keterangan tentang segala sesuatu yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam instalasi (bangunan tempat usaha) itu". Terjemahan ini dapat dibandingkan dengan John Salindeho, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 173.

**Persyaratan Prosedural Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan**

| IZIN HO   | IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)  | IZIN LOKASI  | IZIN LINGKUNGAN   |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir permohonan izin, paling sedikit memuat:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;</li> <li>b. nama perusahaan;</li> <li>c. alamat perusahaan;</li> <li>d. bidang usaha/kegiatan;</li> <li>e. lokasi kegiatan;</li> <li>f. nomor telepon perusahaan;</li> <li>g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;</li> <li>h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan</li> <li>i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>• Fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha</li> </ul> | <p>IUI Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;</li> <li>b. Fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan</li> <li>c. Fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>IUI Menengah dan IUI Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi identitas diri pemohon;</li> <li>b. Fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;</li> <li>c. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>d. Fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri; dan</li> <li>e. Fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akte pendirian perusahaan</li> <li>• NPWP</li> <li>• Sketsa tanah yang dimohon</li> <li>• Pernyataan kesanggupan memberi ganti kerugian/menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah maupun yang berhak atas tanah</li> <li>• Uraian rencana proyek yang akan dibangun</li> <li>• SPPP/ SPPM atau persetujuan prinsip</li> </ul> <p>Persyaratan ini merupakan lampiran dari permohonan izin lokasi yang diajukan pemohon izin lokasi yang telah memberikan isian identitasnya.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;</li> <li>• Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;</li> <li>• Profil Usaha dan/atau Kegiatan.</li> </ul> |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| bagi yang berbadan hukum; dan<br>• Fotokopi status kepemilikan tanah. |  |  |  |
|---|--|--|--|

Dari persyaratan prosedural perizinan lingkungan dapat diketahui tentang penanggung jawab instalasi. Melalui persyaratan prosedural terdapat proyeksi danantisipasi perencanaan yang dilakukan instalasi industri dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Persyaratan prosedural merupakan langkah awal bagi instansi yang berwenang menerbitkan "izin lingkungan" untuk menetapkan elemen persyaratan substansial yang wajib ditaati pemegang izin dalam menjalankan roda perusahaannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan.

#### 4. Persyaratan Substansial Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan

Persyaratan substansial Izin HO dapat ditemukan pada Pasal 6 dan 7 HO yang menekankan bahwa Izin HO diberikan dengan dasar pertimbangan instalasi yang didirikan tidak menimbulkan "gevaar" (bahaya), "schade" (kerusakan) dan "hinder" (gangguan) terhadap lingkungan:

Artikel 6 HO:

- (1) *Weigering van een vergunning geschiedt bij met redenen omkleed besluit.*
- (2) *Tot de weigering kunnen alleen leiden:*
  - I. *de voorschriften van een verordening als bedoeld in de artikelen 2 en 3.*
  - II. *De bezwaren ontleend aan vrees voor:*
    - a. *gevaar;*
    - b. *schade aan eigendommen, bedrijven of de gezondheid;*
    - c. *hinder van ernstigen aard, waartoe behoort:*
      1. *het ter bewoning ongeschikt of minder geschikt maken van woonhuizen of gedeelten van woonhuizen, het belemmeren van het gebruik van scholen of van lokalen en gebouwen bestemd tot zieken verpleging of tot uitoefening van den openbaren eeredienst, binnen een kring van tweehonderd meter van het gebouw of lokaal ler inrichting gelegen; ieder overeenkomstig de bestemming, welke het gebouw of lokaal, tijdens het verzoek werd gedaan, had;*
      2. *het verspreiden van vuil of van walgelijke uitdamping van geuren;*



3. *Vrees voor mededinging in eenig bedrijf, door belanghebbenden geuit, kan geen reden tot weigering zijn.*<sup>66</sup>

Artikel 7 HO:

*Indien door het stellen van voorwaarden aan het bezwaar van gevaar, schade of hinder kan worden tegemoetkomen, wordt de vergunning voorwaardelijk verleend.*<sup>67</sup>

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup terdapat kewajiban pemegang Izin HO untuk mencegah terjadinya *bahaya, kerusakan* atau *gangguan* terhadap lingkungan akibat beroperasinya instalasi industri. Hal itu kemudian dipertegas dengan adanya ketentuan dalam Permendagri No. 27/2009, bahwa yang dimaksud Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan *bahaya, kerugian, dan gangguan*, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

Persyaratan substansial Izin Usaha Industri dalam pengelolaan lingkungan hidup tercermin pada Pasal 82 UU No. 3/2014 yaitu adanya kewajiban industri menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan.

Dalam Pasal 8 ayat (3) Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 diformulasikan persyaratan substansial Izin Lokasi: menghormati kepentingan pihak lain yang tanahnya belum dibebaskan, tidak mengurangi aksesibilitas publik, dan

---

<sup>66</sup>Terjemahan bebas Pasal 6 HO: (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasannya. (2) Alasan yang dapat menyebabkan penolakan hanyalah: I. ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, II. Keberatan-keberatan yang dikarenakan khawatir akan terjadinya: a. bahaya, b. kerugian pada milik, perusahaan atau kesehatan, c. gangguan yang berat, termasuk: 1. sesuatu hal yang menyebabkan rumah kediaman atau bagiannya menjadi tidak dapat atau kurang baik untuk didiami (dihuni), hal merintangai pemakaian sekolah-skolah atau bilik-bilik dan bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk perawatan orang sakit atau untuk menjalankan ibadah umum, yang terletak dalam lingkungan dua ratus meter dari bangunan atau ruangan instalasi itu, masing-masing menurut peruntukan bangunan atau bilik tempat kerja tersebut yang menyengat. (3) Kekhawatiran persaingan dalam suatu perusahaan, yang diketengahkan oleh para pihak yang berkepentingan, tidak dapat menjadi alasan penolakan izin. Bandingkan dengan John Salindeho, *op.cit.*, h. 166-167.

<sup>67</sup>Terjemahan bebas Pasal 7 HO adalah: Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diupayakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerusakan atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan syarat". Lihat *Ibid.*, h. 167.

menjaga kepentingan umum. Sedangkan persyaratan substansial Izin Lingkungan diatur dalam Pasal 53 PP No. 27/2012.

Persyaratan substansial Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dituangkan dalam tabel di bawah ini. Kesempurnaan penuangan persyaratan substansial dalam "perizinan lingkungan" menentukan secara signifikan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan beroperasinya instalasi industri. Perumusan persyaratan substansial memiliki implikasi-korelatif terhadap komponen dasar persyaratan evaluatif perizinan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi (badan hukum).

**Persyaratan Substansial Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan dan Izin Lokasi**

| IZIN HO   | IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)   | IZIN LOKASI  | IZIN LINGKUNGAN   |
|---|---|--|---|
| Mencegah terjadinya: bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan (berupa penyebaran kotoran, penguapan atau kebauan akibat dari beroperasi-nya instalasi industri) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian (fungsi) sumber daya alam (SDA).</li> <li>• Mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan (tanah, air maupun lingkungan)</li> <li>• Mentaati ketentuan baku mutu lingkungan (BML)</li> <li>• Melaksanakan upaya keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses produksi serta berbagai hasil produksinya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati kepentingan pihak lain yang tanahnya belum dibebaskan</li> <li>• Tidak mengurangi aksesibilitas masyarakat sekitar lokasi</li> <li>• Menjaga dan melindungi kepentingan umum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> |

## 5. Persyaratan Evaluatif Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan

Dalam HO tidak ditemukan ketentuan mengenai persyaratan evaluatif Izin HO. Pengaturan Izin HO tidak mewajibkan kepada pemegangnya untuk melakukan pemantauan (*"monitoring"*) dan pelaporan (*"reporting"*) terhadap pelaksanaan persyaratan substansial Izin HO. Namun berdasarkan Permendagri No. 27/2009, ketentuan mengenai persyaratan evaluatif Izin Gangguan mulai diatur. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 10 mengenai kewajiban pemegang izin melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin, serta dalam Pasal 19 mengenai peran serta masyarakat.

Persyaratan evaluatif Izin Usaha Industri terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) UU No. 3/2014 yang mengatur tentang kewajiban pihak industri untuk menyampaikan "data industri" secara periodik "mengenai kegiatan dan hasil produksinya". Namun, peraturan perundang-undangan Izin Usaha Industri tidak memuat keharusan bagi industri untuk mempublikasikan "informasi industri" kepada publik. Informasi industri terkesan (hanya) bersifat internal-birokratik.

Pasal 9 Permenag Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 menetapkan persyaratan evaluatif Izin Lokasi: "menyampaikan secara periodik tentang perolehan tanah dan pelaksanaan penggunaan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan". Pelaporan kegiatan pemegang Izin Lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan merupakan tindakan yang "salah alamat". Wewenang menerbitkan Izin Lokasi menurut Pasal 6 ayat (2) Permenag Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 berada di Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta, bukan di Kepala Kantor Pertanahan.

Selanjutnya mengenai persyaratan evaluatif Izin lingkungan dapat dilihat dalam Pasal 53 PP No. 27/2012 yang menyebutkan bahwa pemegang izin lingkungan wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Berikut tabel perbandingannya.

### Persyaratan Evaluatif Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan

| IZIN HO  | IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)  | IZIN LOKASI   | IZIN LINGKUNGAN  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban pemegang izin melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin</li> <li>• Adanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan</li> </ul> | Menyampaikan data industri secara periodik atau berkala kepada instansi yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) mengenai kegiatan dan hasil industrinya | Menyampaikan laporan secara periodik tentang perolehan tanah dan penggunaan tanah | Kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. |

### 6. Penutup: Persyaratan Perizinan Lingkungan yang Kondusif Bagi Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Berkenaan dengan *persyaratan perizinan lingkungan* yang memiliki arti penting bagi pengelolaan lingkungan hidup, dikemukakan pula aturan di Amerika Serikat, Belanda, Jepang dan Singapura sebagai bahan perbandingan. CAA Amerika Serikat menuangkan persyaratan perizinan lingkungan bagi aktivitas pengelolaan lingkungan

hidup pada ketentuan tentang "permit programs" (Pasal 502) dan "permit conditions" (Pasal 504).<sup>68</sup>

Belanda mengatur persyaratan (prosedural, substansial dan evaluatif) perizinan lingkungan secara khusus dalam *Environmental Management Establishment and Licences Decree*. Dokumen hukum *Environmental Management Establishment and Licences Decree* Pemerintah Belanda ini memuat persyaratan perizinan lingkungan sehubungan dengan pendirian dan pengoperasian suatu instalasi ("*establishment*").<sup>69</sup> APCL Jepang mengatur persyaratan perizinan lingkungan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan pada Pasal 18-18.3 APCL tentang "*Report of the Establishment of Particulates Discharging Facility*".<sup>70</sup> CAA Singapura merumuskan persyaratan perizinan lingkungan yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam *Section 15* mengenai: "*Power of Minister to Prohibit Use of Combustible Materials, Fuel Burning Equipment or Industrial Plant in Certain Area*".<sup>71</sup>

### Persyaratan Perizinan Lingkungan Bidang Pengelolaan lingkungan hidup

| <b>PERSYARATAN PROSEDURAL</b>  |
|--|
| <p><i>Application Form</i>: Diisi lengkap identitas individu dan perusahaan, sehingga mampu menjelaskan tentang kegiatan industri dan penanggung jawabnya.</p> <p>Identitas pemohon (perusahaan dan pimpinannya), informasi kegiatan industri (bahan baku produksi, proses dan hasil produksi serta teknologi yang digunakan), deskripsi instalasi industri dan teknik pengolahan limbah; buangan emisi, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan administratif</p> |

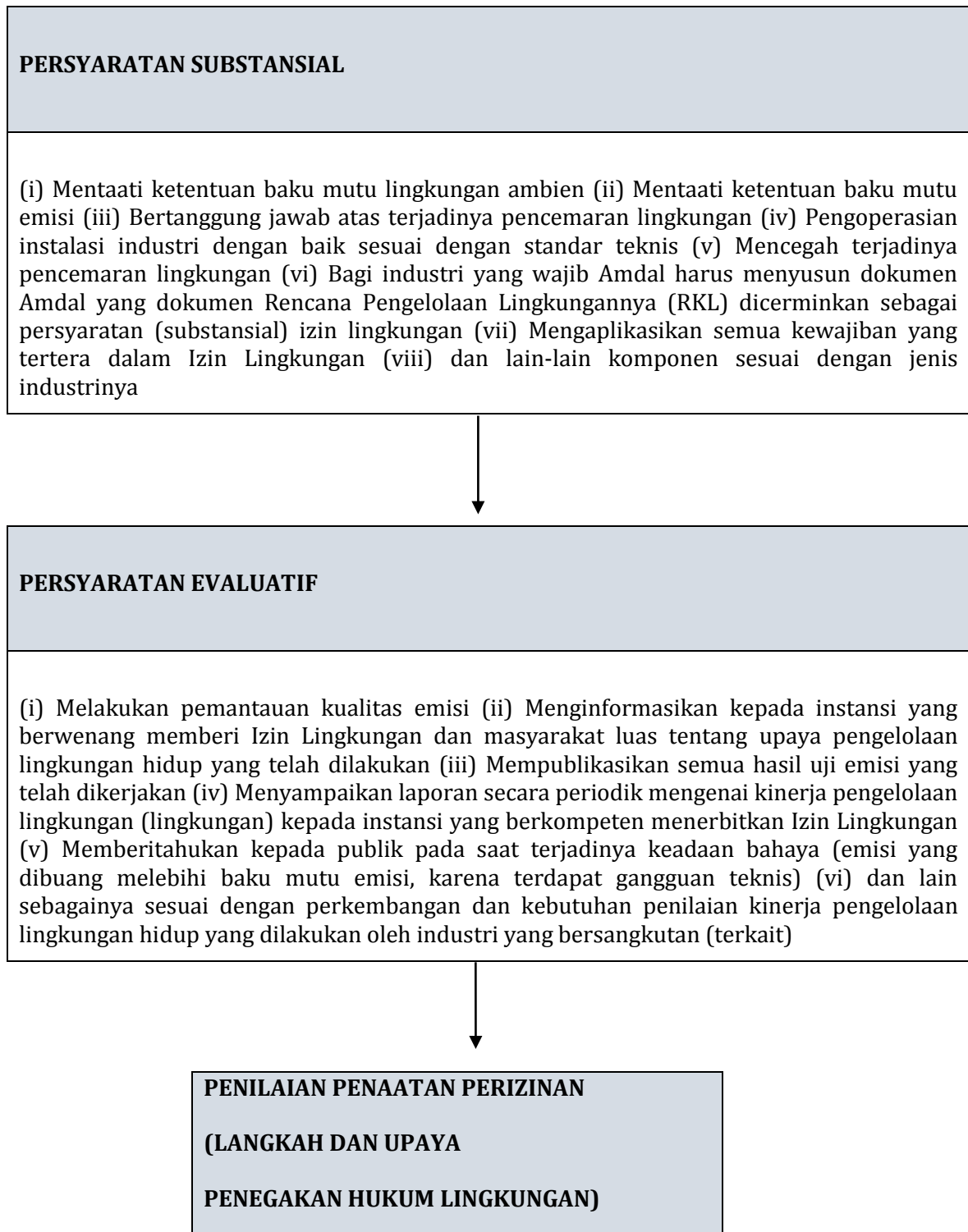


<sup>68</sup>EPA United States Environmental Protection Agency, *Regulations*, <http://www.epa.gov/oar/caa/caa502.txt>, 11/12/2000. M. Granger Morgan, "Risk Analysis and Management", *Scientific American*, July 1993, h. 32-41.

<sup>69</sup>Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment Directorate-General for Environmental Protection Directorate for General Policy/Code 660, *Environmental Management Establishments and Licences Decree*, The Hague, The Netherlands, 1998, h. 3-4.

<sup>70</sup>Environment Agency, *Environmental Laws and Regulations in Japan (II) Air*, Japan, t.th., h. 17-18.

<sup>71</sup>Lye Lin Heng, *op.cit.*, h. 5-6. Sebagai bahan perbandingan adalah United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Bank, *Global Environment Facility: Independent Evaluation of the Pilot Phase*, The World Bank – The International Bank for Reconstruction and Development, Washington, D.C., USA, 1995.



Bertolak dari kajian teoritik dan hukum positif di atas dapat dikemukakan bahwa persyaratan perizinan lingkungan merupakan hal yang vital untuk diatur serinci mungkin dalam rangka menciptakan iklim industry yang kondusif namun tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penentuan persyaratan perizinan lingkungan (prosedural-substansial-evaluatif) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan rangkaian yang mutlak untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Dari persyaratan prosedural dan substansial dapat digambarkan kualitas "individual-institusional" pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan perusahaan. Persyaratan evaluatif perizinan lingkungan harus dirumuskan secara komprehensif dengan menguraikannya dalam komponen administratif yang dapat dinilai secara yuridis.

## DAFTAR BACAAN

- Addink, G.H.**, *Publications About the Implementation and Enforcement of the Climate Change Convention and the Kyoto Protocol*, Utrecht University, The Netherlands, 1998.
- , *General Principles of Good Governance Under GALA*, Utrecht University, Utrecht, 2001.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Literature*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Norms and Enforcement of Climate Change Convention*, Utrecht University, Utrecht, t.th.
- Beroya, Mary Antonette A.**, *Mengenal Lingkungan Hidup: Pedoman Untuk Memperkuat Rakyat*, Yakoma-PGI, Jakarta, 2000.
- Biezeveld, G.A.**, *Duurzame Milieuwetgeving*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.
- Blomberg, A.B.**, *Integrale Handhaving van Milieurecht*, Boom Juridische Uitgevers, de Vrije Universiteit te Amsterdam, 2000.
- Boer, Ben**, (ed.), *Environmental Law in the South Pacific*, IUCN Environmental Law Centre, United Kingdom, 1996
- , et al., *International Environmental Law in the Asia Pacific*, Kluwer Law International, 1998.
- Boon, Foo Kim, Lye Lin Heng and Koh Kheng Lian**, *Environmental Protection: The Legal Framework*, IUCN/APCEL/UNEP Programme, Singapore, 1997.
- Cane, Peter**, *An Introduction to Administrative Law*, Clarendon Press, Oxford, 2001.

- Dix, H.M.**, *Environmental Pollution: Atmosphere, Land, Water, and Noise*, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1981.
- Drupsteen, Th.G.**, et al., *De Toekomst van de Wet Milieubeheer*, Rijksuniversiteit Leiden, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1998.
- Eade, John**, (ed.), *Living the Global City*, Routledge, London, 1997.
- Emond, D. Paul**, *Environmental Law: Resource Materials for the Study of Environmental Law in Indonesia and Canada*, EMDI, Halifax and Jakarta, 1990.
- Environment Agency Japan**, *Environmental Laws and Regulations in Japan*, Japan, 1984.
- , *Texbook for Training Course in Environmental Engineering (Air Pollution Control)*, Japan, 1997.
- Euroconfidentiel S.A.**, *The Rome, Maastricht and Amterdam Treaties*, Belgium, 1999.
- European Commission**, *The European Union and the Environment*, Luxembourg, 1997.
- , *The Customs Policy of the European Union*, Luxembourg, 1999.
- Faure, Michael** and **Gunter Heine**, *Environmental Criminal Law in The European Union*, METRO Institute for Transnational Legal Research, Maastricht, The Netherlands, 1998.
- Foque', R.** en **S. Gutwirth** (red.), *Vraagstukken van Milieurechtelijke Begripsvorming*, Gouda Quint, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2000.
- Gilks, Mark**, *Interim Transport Plan 2000/2001*, Environmental Department, London, 2001.
- Hoekema, A.J.**, et al., *Integraal Bestuur*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998.
- Kiss, Alexandre** and **Dinah Shelton**, *Manual of European Environmental Law*, Grotius Publication Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
- Lee, C.C.**, *Dictionary of Environmental Legal Terms*, McGraw-Hill, New York, USA, 1997.
- Moussis, Nicholas**, *Guide to EU Policies*, European Study Service, Belgium, 2000.
- Mukono, H.J.**, *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.
- , *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Murdiyarso, Daniel**, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003



-----, *Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

-----, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

**NAA**, *Environmental Report '98: Creating an Eco-Airport*, Vol. 3 January 1999.

**Portney, Paul R. and Robert N. Stavins**, *Public Policies for Environmental Protection*, Resources for the Future, Washington C., 2000.

**Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI**, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya*, Jakarta, 1998.

**Rangkuti, Siti Sundari**, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

**Susilo, F.X. Endro, Suparto Wijoyo and Ibrahim**, *An Overview of Indonesian Environmental Law and Comparative Aspects*, Faculty of Law, Utrecht University, The Netherlands, 2002.

**Syarif, La Ode Muhamad**, *The Implementation of International Responsibilities for Atmospheric Pollution*, LEAD Indonesia-ICEL, Jakarta, 2001.

**United Nations**, *The Earth Charter*, October, 2002

**Wood, Christopher**, *Environmental Impact Assessment: A Comparative Review*, Logman Group Limited, England, 1996.

#### Internet Sites

<http://www.epa.gov/oar/caa/contents.html>

<http://europa.eu.int/comm/dg01>

<http://europa.eu.int/eurostat.html>

<http://europa.eu.int/euro>

<http://www.tempointeraktif.com>

<http://www.tempointeractive.com>

<http://www.kompas.com>